ANALISIS WACANA AKUN FACEBOOK HUMOR POLITIK TERKAIT PILKADA DKI JAKARTA TAHUN 2017

Oleh:

Rizki Amalia Yanuartha[1]

Laila Kholid Alfirdaus[2]

ABSTRACT

The development of technology and communication marked a change in the generation of political communication. The interesting thing in it is the realization of political participation through cyber technology accompanied by the emergence of hate speech discourse. This study aims to explain the discourse formed and identify various forms of political messages on the Humor Politik Facebook account related to the DKI Jakarta Regional Election in 2017. The method used is the critical discourse analysis method of Norman Fairclough. Limitation of research on the final goal does not generally look at social changes that occur.

The results of the analysis from 218 memes, linguistically and socio-culturally indicate that the text contains more forms of satire and criticism on two pairs of candidates, namely number 1 (Agus Harimurti Yudhoyono – Sylviana Murni) and 3 (Anies Rasyid Baswedan – Sandiaga Salahudin Uno) governors and deputy governors of DKI Jakarta in 2017. While the text of support to the candidate pairs number 2 (Basuki Tjahaja Purnama – Djarot Saiful Hidayat). The text contains hate speech totaling 23 memes with forms of provocation and insults in the context of religion, ethnicity, race, sexuality, culture and personality.

The production of political messages is a model of communal participation. Seen from the identification of the form and production of messages including the unconventional participation model. While political activities include political participation in the form of electoral activity by showing patterns of participation that express political preferences and indirectly also showing patterns of campaign participation or promotion of certain candidates. The form of political messages also leads to image packaging and tends towards neutralization.

Through social media, political participants can express their opinions in the form of self-satire, criticism, or support. But it also requires a selective and critical attitude in interpreting every political message. Considering the use of social media today encourages more participation and impacts on the continuation of democracy.

Keywords: Hate Speech, Political Messages, Political Participation, Social Media, Critical Discourse Analysis

[1] Program Studi Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

[2] Program Studi Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

1. PENDAHULUAN

Berawal dari perkembangan teknologi dan komunikasi yang menandai perubahan generasi komunikasi politik. Perubahan terjadi dari bentuk komunikasi politik yang dilakukan secara langsung, menjadi komunikasi politik menggunakan media massa, dan yang terbaru komunikasi politik dengan media baru. Generasi ketiga membuka ruang terbuka bagi warga Negara untuk ikut berperan aktif sebagai seorang komunikator politik. Bukan hanya sebagai penerima pesan melainkan juga sebagai pembuat pesan-pesan politik. Aktifitas seperti ini menunjukkan keterlibatan warga Negara dalam aktivitas politik atau partisipasi politik. Hal menarik dalam proses perwujudan partisipasi politik ini adalah munculnya wacana mengenai ujaran kebencian.

Pada tahun 2015, diterbitkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 yang berisi tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*). Alasan Kapolri mengeluarkan SE ini berdasar tragedi yang terjadi di Tolikara Papua dan Singkil Aceh. Hal ini disampaikan oleh Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Anton CH pada tanggal 2 November 2015 di Mabes Polri yang menyatakan bahwa dua kasus di dua daerah Indonesia itu terkumpul melalui dunia maya (internet). Sebagai contohnya pembakaran Gereja di Singkil Aceh karena adanya provokasi di dunia maya[3]. SE diharapkan dapat mengingatkan masyarakat untuk berkata-kata, berbahasa, berbicara yang santun sesuai dengan cerminan budaya[4].

Realitanya penerbitan Surat Edaran *Hate Speech* ini menimbulkan pro dan kontra. Beberapa pihak mendukung dikeluarkannya SE[5] *Hate Speech* dan beberapa pihak lainnya menolak. Seperti Kontras, PSHK, LBH Pers merupakan pihak-pihak yang menolak SE Kaplori ini. Melalui Direktur Lembaga Bantuan Hukum Pers Asep Komarudin, berpendapat bahwa SE ini akan berdampak buruk dan mampu menimbulkan kehancuran karena peraturan di dalamnya yang multitafsir dan

[3] Berdasarkan artikel,' Dua Alasan Kapolri Terbitkan Surat Edaran Hate Speech', Dara Purnama, 2015. Diambil dari http://news.okezone.com/read/2015/11/02/337/1242188/dua-alasan-kapolri-terbitkan-surat-edaran-hate-speech. Diunduh pada 13 November 2015 pukul 9.56 a.m.
[4] *Ibid*
[5] SE (Surat Edaran)

multiinterpretasi[6]. Pendapat lainya oleh Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Muhammad Nasser yang mengkhawatirkan bahwa SE Kapolri ini akan mengganggu kebebasan berpendapat. Wakil Ketua Komisi III DPR, Desmond J. Mahesa berpendapat SE merupakan bentuk lain dari larangan penghinaan presiden yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Mantan Menteri Hukum dan HAM era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Amir Syamsudin menduga ada agenda pemerintah dibalik SE ini karena munculnya bersamaan dengan peristiwa pencemaran nama baik pemimpin Negara atau tokoh tertentu. Luhut Pangaribuan sebagai Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia yang mengatakan bahwa SE harus dicabut karena pasal-pasal yang tercantum di dalamnya sudah ada di berbagai Undang-Undang[7].

Tidak hanya komentar dari para kalangan politisi, beberpa *netizen* juga mengecam dikeluarkannya SE ini. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil pantauan situs eveline terhadap perbincangan di media sosial twitter antara 2-3 November 2015, terdapat 8.353 tweet yang mengecam SE tersebut. Beberapa pihak seperti Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia dan Direktur Eksekutif SNH Advocacy Center Sylviani Abdul Hamid menyatakan bahwa SE menandakan adanya reaksi berlebihan dari pemerintah dan aparat Negara yang mencederai kemajuan demokrasi, mengeluarkan pendapat dan berekspresi di Indonesia, sehingga tidak jauh berbeda ketika zaman Orde Baru[8].

Di lain pihak, menurut Kapolri Jendral Badrodin Haiti, SE bukan UU baru melainkan hanya edaran kepada personel kepolisian. Ungkapan kebencian telah

[6] Berdasarkan artikel,'Edaran Kapolri soal "Hate Speech" Dinilai sebagai Blunder', Nabila Tashandra, 2015. Diambil dari http://nasional.kompas.com/read/2015/11/10/22400611/Edaran.Kapolri.soal.Hate.Speech.Dinilai.sebagai.Blunder. Diunduh pada 13 November 2015 pukul 9.49 a.m.

[7] Berdasarkan artikel,'Pro Kontra Surat Edaran "Hate Speech" dan Jawaban Kapolri', Fabian Januarius Kuwado, 2015. Diambil dari http://nasional.kompas.com/read/2015/11/06/07423391/Pro.Kontra.Surat.Edaran.Hate.Speech.dan.Jawaban.Kapolri. Diunduh pada 13 November 2015 pukul 9.56 a.m.

[8] Berdasarkan artikel Forum Keadilan: No. 26, 15 November 2015 hal 16-19,'Surat Edaran Kapolri yang Dicurigai' Hamdani dan Sofyan Hadi. 2015. Diambil dari http://www.komnasham.go.id/sites/default/files/dokumen/Forum%20Keadilan%20Nomor%2026%20Tahun%20XXIV%209-15%20November%202015.pdf. Diunduh pada 13 November 2015 pada 9.58 a.m.

ada sebelumnya di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Penghapusan Diskriminasi RAS dan Etnis, dan perundangan lainnya. Selain itu SE ini tidak bertentangan dengan HAM tetapi membentengi demokrasi agar tidak melanggar hukum dan menjadi tameng bagi Polri agar tidak ragu-ragu dalam mengusut kebencian yang disebarkan seseorang. Begitu halnya pendapat mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD yang melihat SE tidak mengatur hukum pidana baru. Namun secara psikologis SE ini dapat berpotensi meresahkan masyarakat dan mendapatkan tanggapan yang negatif di dalamnya[9].

2. KAJIAN PUSTAKA

Demokrasi adalah konsep dari pemerintahan yang dijalankan dari, oleh, dan untuk rakyat. Pelaksanan demokrasi tidak hanya dilaksanakan oleh aktor politik elit seperti legislatif, eksekutif dan yudikatif, namun rakyat atau warga Negara memiliki peranan besar didalamnya. Oleh karenanya pemerintahan yang demokratis memerlukan partisipasi dari seluruh rakyatnya sebagai kontrol, kritisme dan pengawasan. Teknologi digital sendiri menjadi sarana perwujudan partisipasi tersebut (Andriadi, 2016:6). Namun, ketika Surat Edaran Kapolri mengenai Ujaran Kebencian ini ada, munculah berbagai perdebatan seperti yang dijelaskan di atas, baik pro maupun kontra. Hal ini karena dianggap Surat Edaran tersebut dapat membatasi kebebasan berpendapat dan menciderai demokrasi.

Berdasarkan kontroversi antara dua konsep di atas, partisipasi politik dan ujaran kebencian, maka akan dilakukan penelitian terhadap salah satu akun di media sosial dilihat dari wacana dan pesan politik yang ada. Permasalahan penelitian muncul bermula dari isu-isu empirik yang mulai dari perkembangnya tekonologi dan komunikasi dewasa ini. Salah satunya adalah berkembangnya *new media* atau internet, sebagai generasi ketiga dalam komunikasi politik. Adapun praktik komunikasi politik yang terjadi diantaranya adalah penyebaran informasi berkitan dengan dunia politik di Indonesia, sosialisasi kebijakan, kampanye politik,

[9] *Ibid*

dan warga Negara[10] yang memberikan opini atau komentar atas situasi politik yang terjadi saat ini.

Berdasarkan pengamatan dan analisis isi sederhana yang dilakukan peneliti pada dua akun di Instagram dan dua akun di Facebook, diketahui satu akun dengan jumlah pengikut paling banyak, yaitu akun Facebook Humor Politik dengan total pengikut 283.166. Selain itu, akun ini berisi produk meme yang selalu update atau baru sesuai dengan kondisi politik yang terjadi. Selain itu dilihat dari periode waktu dari Januari hingga Maret, topik meme akun ini paling tinggi berisi tentang Pilkada DKI Jakarta 2017 yaitu 218 meme. Melihat dari waktu pengamatan, hal ini sesuai dengan situasi politik pilkada yang sedang terjadi[11].

Oleh karena itu, peneliti menetapkan meme akun Facebook Humor Politik dengan topik Pilkada DKI Jakarta 2017 periode waktu dari bulan Januari sampai Maret sebagai sasaran penelitian. Akun ini dipilih karena beberapa alasan. Jumlah pengikut akun Facebook Humor Politik yang banyak sebagai wujud antusias warga Negara.

Media sosial merupakan salah satu media atau ruang yang merepresentasikan tempat untuk melakukan aktifitas politik di era digital, dimana prinsip atau nilai yang diusung yaitu kebebasan dan transparan. Meme yang memuat pesan dengan gaya parodi, sindiran, kritik, dan dapat menimbulkan kemarahan, adalah salah satu produk dari *cyberdemocracy*.

Konsep komunikasi politik lebih menekankan tentang bagaimana menganalisis hak dan kesempatan warga Negara dalam menjadi pengelola informasinya secara aktif dan mandiri. Konsep dasar inilah yang kemudian akan digunakan untuk lebih mendalami analisis wacana pada akun Facebook Humor Politik dalam aktifitas politik komunikasi sebagai perwujudan partisipasi politik di Indonesia. Adapun sifat meme sebagai objek penelitian, produk pesan politik yang bermuatan parodi, kritik, dan bahkan membuat kemarahan. Berdasarkan pemilihan latar belakang permasalahan di atas, maka peneliti akan melakukan kajian analisis

[10] *Netizen*
[11] Masa sebelum dan sesudah pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta

wacana dalam menjelaskan wacana akun Facebook Humor Politik dan mengidentifikasi bentuk-bentuk pesan politik pada akun tersebut terkait Pilkada DKI Jakarta tahun 2017.

3. METODOLOGI

Metode yang akan digunakan peneliti dalam menganalisis permasalahan penelitian adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode yang digunakan adalah metode analisis wacana kritis (*Critical Discourse Analysis*) yang dikemukakan oleh Norman Fairclough. Fairclough membagi analisis wacana dalam tiga dimensi: *teks, discourse practice,* dan *sociocultural practice*. Sedangkan kajian yang dianalisis berdasarkan konteks dari teks yang akan diteliti yaitu berupa teks meme yang diperoleh dari akun Facebook Humor Politik terkait kasus Pilkada DKI Jakarta 2017 dari bulan Januari sampai Maret 2017.

Metode kualitatif menekankan peneliti sebagai *key instrument* atau instrumen kunci. Artinya peneliti memiliki peranan penting dalam aktivitasnya mengumpulkan data melalui dokumentasi, observasi perilaku, atau wawancara (Creswell, 2014:261). Sedangkan pada penelitian ini, metode pengumpulan data menggunakan cara observasi dan dokumentasi. Pertama, observasi dilakukan terhadap beberapa akun politik di Facebook dan Instagram yang dilakukan dari bulan Januari hingga Maret 2017. Selanjutnya peneliti melakukan analisis isi sederhana dengan mencatat dan menghitung konten yang diunggah, dan jumlah *follower* (pengikut akun). Berikut ini alur pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti: (1) Pencarian akun di media sosial yang berisi tentang konten atau pesan-pesan politik yang mengandung sindiran, kritik, dan yang dapat mengundang tawa atau kemarahan, (2) Memilih satu akun dari media sosial tersebut untuk membatasi objek penelitian, (3) Melakukan analisis isi sederhana terhadap akun terpilih. Peneliti mengamati secara online konten yang di-*upload* oleh akun. Peneliti melakukan pendataan tentang konten yang di-*upload* (4) Pembatasan periode waktu pesan politik yang di-*upload* oleh akun, (5) Rekapitulasi konten atau isi dari akun terpilih, (6) Menentukan konten yang paling banyak menjadi pesan politik, (7)

Tahap selanjutnya melakukan *screen capture* sebagai data utama berupa teks meme sejumlah 218 meme. Kedua, dokumentasi menjadi cara pengumpulan data pada penelitian ini dengan memperoleh data secara digital dari akun resmi Humor Politik.

Pada tahap analisis data rancangan tahapan atau alur analisis dan interpretasi data penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, antara lain:

- Menentukan sumber data dan korpus data. Sumber data primer adalah meme di akun Facebook Humor Politik dalam kasus pilkada DKI Jakarta 2017 antara bulan Januari-Maret 2017. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari sumber-sumber lain seperti buku, jurnal, internet, laporan penelitian, makalah, berita-berita (cetak atau internet). Sedangkan korpus data adalah teks ekspresi ujaran kebencian, dimana teks tersebut sebuah bentuk komunikasi yang mengandung unsur berdasarkan atas prasangka negative, berisi ekspresi kebencian Suku, Agama, dan Ras (SARA) serta kelompok identitas lainnya, disebarkan menggunakan berbagai macam media, kegiatan menghasut kebencian dan kemarahan, berdampak kolektif, diskriminasi, dan kekerasan. Bentuknya seperti penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan menyebarkan berita bohong yang didasarkan atas tujuan atau dapat berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial.

- Prosedur pengumpulan data. Prosedur ini telah dijabarkan dalam sub bab teknik pengumpulan data di atas.

- Menentukan Instrumen Penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti terdiri dari beberapa, antara lain: (a) Akun Media Sosial Berisi Pesan Politik, (b) Daftar Konten Akun Facebook Humor Politik Bulan Januari-Maret 2017, (c) Rekapitulasi Konten Akun Facebook Humor Politik Bulan Januari-Maret 2017, (d) Analisis Teks Tahapan Deskripsi, (e) Analisis Interpretasi , dan (f) Analisis Sosiocultural Practice. Analisis meliputi level situasional, institusional dan social.

Seperti yang dipaparkan di latar belakang, bahwa terdapat batasan dalam penelitian. Norman Fairclough membangun suatu model yang secara umum diintegrasikan pada perubahan social, namun pada penelitian terkait meme Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 di akun Facebook Humor Politik ini, dilakukan beberapa batasan sehingga pada tujuan akhir tidak secara umum melihat perubahan sosial yang terjadi.

Adapun batasan lain yang juga diterapkan pada penelitian adalah tahap analisis, antara lain:

1. Pada tahap analisis meme, yaitu tahap interpretasi, hanya dilakukan penelusuran jejak digital untuk mengetahui profil dari akun Humor Politik. Sehingga analisis pada tingkat *discourse practice news room* atau produksi teks ini tidak dilakukan metode wawancara.

2. Pada tahap analisis meme, yaitu tahap eksplanasi, analisis untuk tiga level (situasional, institusional, sosial) tidak dilakukan untuk setiap meme (218 meme), melainkan berdasarkan hasil tahapan deskripsi (analisis teks) sebelumnya yang dilanjutkan dengan studi pustaka pada hasil penelitian.

4. PEMBAHASAN

Hasil pengamatan data akun media sosial yang berisi tentang konten politik.

Tabel 1.1. Akun Media Sosial Berisi Konten Politik

No	Media Sosial	Nama Akun	Jumlah Pengikut (*Follower*)
1	Instagram	Dunia Politik	73.000*
2	Instagram	Obrolan Politik	159.000*
3	Facebook	Meme Politik	897*
4	Facebook	Humor Politik	283.166*

Sumber: Instagram Dunia Politik, Instagram Obrolan Politik, Facebook Meme Politik, Facebook Humor Politik, diolah. * *Update pada tanggal 30 Maret 2017.*

Dari tabel di atas menunjukkan akun media sosial Facebook Humor Politik memiliki jumlah follower terbanyak dibandingkan akun yang lain.

Hasil rekapitulasi analisis isi sederhana konten meme akun Facebook Humor Politik dari bulan Januari 2017 sampai Maret 2017.

Tabel 1.2.Rekapitulasi Konten Akun Facebook Humor Politik Bulan Januari-Maret 2017

No	Bulan	Jumlah Upload Meme	Meme (Konten dan Jumlah *upload* terbanyak)				
			1	2	3	4	5
1	Januari	175	Pilkada DKI Jakarta 2017 (60)	FPI (14)	Fitsa Hats (12)	Habib Rizieq (11)	Jokowi (7)
2	Februari	236	Pilkada DKI Jakarta 2017 (89)	SBY (26)	Habib Rizieq (10)	Plt Gubernur DKI Jakarta (6)	Arab (5)
3	Maret	176	Pilkada DKI Jakarta 2017 (69)	Raja Salman (20)	Pilkada DKI Jakarta & Orba (8)	Orba Soeharto (6)	Sandiaga Uno (5)

Sumber: Facebook Humor Politik (bulan Januari – Maret 2017), diolah.

4.1 Analisis Teks secara Linguistik

Pada tahapan ini dilakukan analisis secara deskripsi teks yang terdapat dari masing-masing meme bulan Januari – Maret 2017. Pada bulan Januari terdapat 60 meme, Februari terdapat 89, dan Maret terdapat 69 meme. Sehingga total terdapat 218 meme. Berikut contoh tahapan deskripsi dari 3 (tiga) meme;

No	Teks pada akun	Wacana Ujaran Kebencian
56		Dilihat dari teks tertulis dan symbol yang muncul, meme ini tidak secara spesifik mengarah ke bentuk ujaran kebencian tertentu. Meme ini berisikan sindirian terhadap cagub Agus mengenai program kerjanya yang membingungkan dilihat dari teks caption dan gambar artikel berita yang ditunjukkan. Program kerja dalam artikel yang tertulis antara program rumah rakyat tanpa penggusuran dengan artikel lain berisi persiapan tim ahli untuk relokasi warga ke rusun.

Gambar 1. Deskripsi Meme akun Humor Politik nomer 56 bulan Januari 2017

No	Teks pada akun	Wacana Ujaran Kebencian
60		Dilihat dari teks tertulis dan symbol yang muncul, meme ini menunjukkan bentuk provokasi dan penghinaan. Meme mengarah ke aktifitas provokasi dan penghinaan yang menampilkan teks perbandingan antara paslon nomer 2 dengan paslon nomer 3, dimana paslon nomer 3 disamakan dengan tokoh dari film ted. Selain itu tersirat kata sales mesum dan suka mabok.

Gambar 2. Deskripsi Meme akun Humor Politik nomer 6 bulan Februari 2017

No	Teks pada akun	Wacana Ujaran Kebencian
5		Dilihat dari teks tertulis dan symbol yang muncul, meme ini tidak secara spesifik mengarah ke bentuk ujaran kebencian tertentu. Meme ini berisikan sindirian terhadap pernyataan cagub Anies atas pertanyaan presenter acara Mata Najwa. Teks tertulis apakah sikap anda ikhlas dalam menerima kekalahan. Ahok menjawab itu semua terjadi atas ijin Tuhan. Sedangkan Anies menjawab kalau kalah berarti dicurangi.

Gambar 3. Deskripsi Meme akun Humor Politik nomer 5 bulan Maret 2017

4. 2 Teks yang mengandung unsur ujaran kebencian

Berdasarkan hasil analisis teks pada meme bulan Januari, Februari, dan Maret, meme yang mengandung pesan politik dengan unsur ujaran kebencian tergolong sedikit, yaitu 23 meme. Pada bulan Januari ada sekitar 11 (sebelas) meme,

bulan Februari sekitar 10 (sepuluh) meme, dan Maret 2 (dua) meme. Berikut ini nomer meme yang diinterpretasi mengandung unsur wacana ujaran kebencian, antara lain:

Tabel 1.3. Data Meme yang Mengandung Unsur Ujaran Kebencian

No	Bulan	Nomer Meme	Bentuk Ujaran Kebencian
1	Januari	1, 3, 6, 10, 11, 12, 21, 30, 32, 34, 44	Provokasi dan atau penghinaan
2	Februari	1, 6, 9, 10, 16, 17, 21, 22, 37, 45	Provokasi dan atau penghinaan
3	Maret	6, 17	Provokasi dan atau penghinaan

Sumber: Facebook Humor Politik (bulan Januari – Maret 2017), diolah.

Adapun konteks dalam teks ujaran kebencian yang ditampilkan seperti agama, suku dan atau ras, seksualitas, budaya dan personality.

4. 3 Teks berupa sindiran, kritikan, dan tanggapan

Berdasarkan hasil analisis teks pada meme bulan Januari, Februari, dan Maret, meme cenderung mengandung pesan dalam bentuk sindiran, kritikan, tanggapan, dan dukungan. Bentuk sindirian dan kritikan dalam berbagai konteks menjadi pesan politik yang sering muncul. Dalam analisis teks di atas beberapa bentuk konteks yang sering digunakan sebagai bahan meme, antara lain: program kerja dan karakter pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, serta konteks agama. Sindiran dan kritikan lebih banyak ditujukan kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomer urut 1 (Agus Harimurti Yudhoyono – Sylviana Murni) dan pasangan calon nomer urut 3 (Anies Rasyid Baswedan – Sandiaga Salahudin Uno).

4.4 Teks berupa dukungan

Berdasarkan hasil analisis teks pada meme bulan Januari, Februari, dan Maret, meme yang mengandung pesan dukungan ditujukan kepada pasangan calon nomer urut 2 (Basuki Tjahaja Purnama – Djarot Saiful Hidayat).

4.4.1 Dimensi Analisis pada Proses Produksi dan Konsumsi Teks

Akun Facebook Humor Politik merupakan klub atau komunitas komedi yang memfokuskan pada konteks politik. Jika selama ini politik dipahami sebagai sesuatu aktifitas serius, di sini politik disajikan dengan sentuhan "humor". Di dalam profil akun tertulis keterangan "menertawakan POLITIK KOTOR mereka yang mengaku TERHORMAT". Hal ini merepresentasikan ruang publik yang bebas berekspresi. Melalui pesan-pesan yang tertulis terkait isu Pilkada DKI Jakarta 2017, pesan berisi sindiran atau kritikan dan dukungan yang dikemas dengan citra humor masa kini sesuai situasi dan kondisi baik secara tersurat maupun tersirat.

Dalam produksi pesan, meme merupakan hasil kreativitas dari akun Humor Politik sendiri. Terdapat juga pesan politik hasil dari netizen lain yang kemudian diupload ulang melalui akun Humor Politik ditambah dengan status dari akun. Seperti contoh meme bulan Januari nomer 25-1 dan 25-2, meme bulan Februari nomer 21, dan meme bulan Maret nomer 5. Selain itu dalam produksi pesan, meme yang muncul di akun Humor Politik merupakan hasil dari reproduksi pesan yang mengandung wacana ujaran kebencian. Artinya adalah akun mengambil pesan dari luar dan kemudian direproduksi lagi menjadi meme. Meme hasil reproduksi pesan di atas, setelah diolah kembali oleh akun facebook Humor Politik menjadi pesan politik berupa sindiran atau kritikan akan pesan sebelumnya. Selanjutnya meme hasil reproduksi pesan ini diupload secara daring.

4.4.2 Dimensi Analisis *Sociocultural Practice*

a. Analisis Situasional

Pada tahap analisis deskripsi ditemukan bahwa teks yang terkandung dalam meme berbentuk sindiran, kritikan, tanggapan, dukungan, dan terdapat teks yang mengandung unsur ujaran kebencian. Berkaitan dengan topik yang diangkat, pada bulan Januari sampai Maret 2017, akun Facebook Humor Politik membuat dan mengupload berbagai konten politik yang terjadi, dimana hasilnya konten terkait Pilkada DKI Jakarta menjadi topic yang sering dianggat. Hal ini berkaitan dengan waktu pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta itu sendiri yaitu pada tanggal 15 Februari 2017. Selain itu, diadakan putaran kedua pemilihan pada 19 April 2017. Sehingga,

pesan politik berupa meme yang dikemas sedemikian rupa merupakan sebuah ekspresi dalam menanggapi kondisi politik yang terjadi di Jakarta.

Bentuk konteks yang sering digunakan sebagai bahan meme antara lain, program kerja dan karakter pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, serta konteks agama. Bentuk sindirian dan kritikan menjadi pesan politik yang sering muncul. Objek sindiran dan kritikan ditujukan kepada pasangan calon nomer urut 1 (Agus Harimurti Yudhoyono – Sylviana Murni) dan pasangan calon nomer urut 3 (Anies Rasyid Baswedan – Sandiaga Salahudin Uno).

Contoh pesan politik pada akun Humor Politik di atas menunjukkan bahwa media sosial menjadi sarana baru partisipasi politik yang bebas dalam memproduksi pesan-pesan politik. Menurut Kaase dan Marsh (dalam Mujani, dkk., 2012:82), produksi pesan politik di atas termasuk ke dalam model partisipasi tidak konvensional, yaitu aktifitas warga Negara untuk mempengaruhi hasil akhir dari proses politik (Pilkada DKI Jakarta 2017) dengan berbentuk protes.

Teks yang tertulis di dalam meme juga merupakan dukungan untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terkhusus nomer 2 (Basuki Tjahaja Purnama – Djarot Saiful Hidayat). Pembuatan pesan-pesan politik ini merupakan sebuah tindakan yang memiliki tujuan tertentu. Menurut Affan Gaffar (dalam Andriadi, 2016:206) menulis opini di media social termasuk didalamnya berupa promosi atau dukungan dapat dikategorikan sebagai kampanye yaitu model partisipasi politik berbentuk *electoral activity*. Penggunaan media social memungkinkan dibaca oleh ratusan atau bahkan ribuan calon pemilih lainnya, yang berpotensi terpengaruh atau tersugesti dengan konten pesan politik tersebut (Andriadi, 2016:209).

Berdasarkan hasil analisis teks pada meme bulan Januari, Februari, dan Maret, meme yang mengandung pesan politik dengan unsur ujaran kebencian tergolong sedikit yaitu 23 meme. Terlepas dari sedikit banyaknya jumlah meme yang mengandung unsur ujaran kebencian, disimpulkan bahwa ujaran kebencian sebagai salah satu bentuk ekspresi partisipasi politik. Media Sosial juga menjadi sarana partisipasi politik warga Negara yang berbentuk protes sosial, protes politik, atau kritik atas kebijakan pemerintah (Andriadi, 2016:13).

b. Analisis Institusional

Adanya pesan politik berupa sindiran dan kritikan terhadap pasangan calon nomer 1 dan 3 serta dukungan untuk pasangan calon nomer 2 menunjukkan bahwa akun media sosial Facebook Humor Politik digunakan untuk media persaingan (kompetisi) politik. Seperti yang diungkapkan (Firmanzah, 2008) bahwa persaingan politik adalah pertempuran untuk memenangkan hati pemilih. Media memiliki kekuasaan untuk membawa pesan politik dan membentuk opini publik. Melihat pesan teks yang muncul, pembaca diarahkan untuk menerima informasi yang "baik" mengenai pasangan calon nomer 2. Walaupun dari 218 meme hanya sedikit yang menyuratkan dukungan untuk pasangan calon nomer 2, akan tetapi dari banyaknya sindirian dan kritikan terhadap paslon nomer 1 dan 3 menjadikan pesan-pesan tersebut wujud dari dukungan secara tersirat. Sehingga secara tidak langsung membentuk "image politik yang baik" untuk menggalang dukungan publik calon nomer 2. Sesuai dengan peran teknologi internet, dimana teknologi internet dipergunakan untuk penggalangan dana biaya kampanye, melobi, merekrut, dan mengorganisasikan para relawan. Selain itu, internet juga dimanfaatkan untuk mengumpulkan, membentuk, dan mengaktivasi komunitas yang menjadi pendukung partai politik dan para kandidat (Sayuti, 2014:133).

Akun Facebook Humor Politik menjadi salah satu produk perkembangan teknologi. Facebook sebagai salah satu jenis media sosial menyediakan fasilitas bagi setiap pengguna tak terbatas untuk mengakses setiap informasi yang dibutuhkan. Tidak hanya sebagai pembaca pasif atas pesan dan informasi, akan tetapi juga dapat terlibat secara aktif sebagai "si pemberi dan pembuat" pesan. Begitu halnya dengan akun Facebook Humor Politik yang menjadi wadah diskusi ruang publik dunia maya yang tidak dibatasi oleh apapun. Menurut Habermas, di dalam ruang publik (*public sphere*) yang bebas dan otonomlah para individu bertindak sebagai political persons untuk memperbincangkan dan melaksanakan apa yang telah disepakati bersama sebagai kepentingan bersama (Subiakto dan Ida, 2014:280-281). Akan tetapi pada penelitian ini, ruang publik maya mengarah pada pengemasan citra dan cenderung ke arah netrokrasi. Penggunaan media sosial dalam pembuatan dan penyebaran secara daring pesan-pesan politik mengarah pada pengemasan citra. Hal ini dikarenakan bentuk dari pesan politik berupa sindiran dan kritikan dan

bahkan pesan yang mengandung unsur ujaran kebencian teruntuk pasangan calon nomer 1 dan 3 itu sendiri dan secara tidak langsung membentuk citra yang "baik" untuk pasangan calon nomer 2.

Selain itu, pengunggahan di ruang publik baru (media sosial) berdasarkan hasil penelitian sebelumnya oleh Andriadi pada Pilkada DKI Jakarta 2012 (dalam Andriadi, 2017:190-192), ditemukan tiga model penggunaan media social sebagai sarana partisipasi politik, antara lain; *pertama,* pola partisipasi dengan mengekspresikan preferensi politiknya, *kedua,* pola partisipasi dengan mengkampanyekan (mempromosikan) kandidat tertentu, *ketiga,* pola partisipasi menggalang dukungan public (mengajak pemilih lain). Pada hasil analisis terkait Pilkada DKI Jakarta 2017 ini, pola partisipasi yang terjadi adalah pola pertama dan kedua. Pada pola pertama tindakan yang dilakukan akun Facebook Humor Politik adalah membuat meme dengan segala atribut yang muncul untuk menunjukkan dukungannya pada paslon nomer 2. Pada pola kedua tindakan yang dilakukan akun Facebook Humor Politik adalah membuat meme dan meng-*upload*-nya yang mengarah ke pembentukan citra positif pasangan calon nomer 2.

Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian Andriadi terkait Pilkada DKI Jakarta tahun 2012 (dalam Andriadi, 2017:198), dibedakan secara kategoris dua model partisipasi politik, yaitu secara personal dan komunal. Pada penelitian ini menggunakan model komunal dengan membuat gambar dan karya kreatif lainnya. Model komunal menjalankan partisipasi secara bersama-sama untuk kepentingan mengekspresikan, menyosialisasikan, atau menggalang dukungan untuk kandidat tertentu di media social (Andriadi, 2017:213). Akun Facebook Humor Politik terdiri dari satu akun, akan tetapi akun ini adalah sebuah komunitas yang di dalam terdiri dari lebih dari satu orang. Komunitas ini membuat berbagai pesan politik berupa meme dan lainnya yang dikemas secara humor. Aktifitas yang dilakukan oleh akun tergolong ke dalam bentuk sosialisasi atau kampanye.

Kelemahan analisis ini karena tidak dapat melakukan pengecekan secara langsung melalui wawancara dengan akun terkait, apakah komunitas ini merupakan salah satu tim kampanye dari kandidat tertentu. Akan tetapi, melihat dari jejak digital akun Facebook yang pada mulanya dibentuk bernama Meme Pro

Jokowi, sangat memungkinkan jika pesan politik terkait Pilkada DKI Jakarata 2017 lebih cenderung mendukung untuk pasangan calon nomer 2. Joko Widodo (Jokowi) memiliki kedekatan secara personal dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), karena pada tahun 2012 Jokowi perpasangan dengan Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta 2012, dan menjadi Gubernur-Wakil Gubernur periode 2012-2017. Pada tahun 2014 Jokowi melangkah ke pemilihan Presiden Republik Indonesia dan posisi tugas Gubernur Jakarta dilanjutkan oleh Ahok. Artinya bahwa sangat memungkinkan jika isi pesan politik di akun Facebook Humor Politik lebih cenderung mendukung pasangan calon nomer 2 Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat.

Penggunaan media sosial sebagai media penyampai kritik dan kegiatan kampanye menjadi salah satu karakteristik politik generasi digital menurut Don Tapscott (2013) (dalam Andriadi, 2016:299-303). Begitu juga menandakan bahwa *cyberdemocracy* dengan ruh kebebasan, persamaan, kritik keterbukaan, dan kritis terjadi melalui aktifitas politik di akun Facebook Humor Politik. Namun, ruang publik ini juga membuka peluang terjadinya pergeseran dari demokrasi ke arah netrokrasi. Netrokrasi menurut Yasraf A. Piliang (dalam Andriadi, 2016:111) adalah sistem demokrasi seduksi (rayuan), yaitu kekuasaan tertinggi diperoleh melalui rayuan. Siapa yang dapat mengemas citra dirinya, dialah yang berkuasa yaitu dengan penguasaan informasi. Sejalan dengan definisi dan karakter ini, pesan-pesan berupa sindiran dan kritikan untuk pasangan calon nomer 1 dan 3, dukungan untuk pasangan calon nomer 2 menggambarkan pengemasan citra yang baik untuk pasangan calon nomer 2. Hal ini berarti bahwa akun Facebook Humor Politik memfasilitasi terjadinya netrokrasi.

c. Analisis Sosial

Pesan politik yang dikemas dengan humor masa kini dan menggunakan karakteristik media sosial akan berdampak pada masa depan demokrasi di Indonesia. Media sosial dalam internet telah memiliki andil di dalam isu-isu politis. Dutta-Bergeman dan Chung (2007) (dalam Wayansari, 2011) menjelaskan lebih lanjut bahwa informasi di internet memiliki peranan penting untuk pembelajaran politik yang lebih mendalam dan pada akhirnya akan mendorong lebih banyak

partisipasi. Hal yang menarik adalah keterlibatan kaum muda milenial di dunia politik di Indonesia. Keterlibatan di dunia politik dalam jejaring media sosial menunjukkan kreatifitas dan kepedulian tentang iklim politik yang sedang terjadi. Perlu diingat, kebanyakan pengguna media sosial yang kreatif membuat gambar-gambar adalah golongan usia muda produktif, bukan para lansia. Apalagi jika mengamati gambar-gambar bernuansa politik dan humor yang tersaji, sangat dimungkinkan merupakan hasil kreasi kaum muda. Disamping itu penggunaan media sosial di Indonesia sendiri menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa (Lim, 2013:3-4). Indonesia telah menjadi negara terbesar ketiga di *Facebook* (Socialbakers 2012) dengan 43 juta pengguna dan kelima di *Twitter* dengan 29,4 juta pengguna (Semiocast 2012) (dalam Lim, 2013). Data lain berdasarkan sumber Apjii, pengguna Internet di Indonesia tahun 2015 mencapai 139 juta. Dari awal tahun 1998 (setengah juta) hingga 2015, angka pengguna internet menunjukkan peningkatan. Selain itu kota yang menunjukkan pengguna internet tertinggi adalah Jakarta dengan jumlah di atas angka 9 juta (Andriadi, 2016:305-306). Inilah terobosan baru bagi peningkatan partisipasi politik yang terwujud melalui pesan-pesan identik dengan pengguna internet dewasa ini.

Melihat karakter generasi digital dan sikap mereka terhadap politik di era digital, juga menunjukkan kekuatan demokrasi dalam *cyberdemocracy* yaitu dengan kebebasan, persamaan, kritik keterbukaan, dan kritis. Selain itu, media sosial sendiri menjadi sebuah senjata dalam rangka peningkatan partisipasi. Menurut Anwar Abugaza (2013) (dalam Andriadi 2017:278), media sosial memiliki kekuatan dan kekhasan seperti menyentuh pemilih pemula. Media sosial menjadi alat komunikasi dan informasi yang tengah digandrungi oleh generasi muda (*net generation*) yang rata-rata merupakan pemilih pemula. Oleh karena itu, sangat memungkinkan dengan menggunakan media sosial sebagai alat sosialisasi atau kampanye atau mencari dukungan dan lain sebagainya, dan menggunakan pesan politik yang bernuansa humor akan menarik perhatian kalangan muda yang sebelumnya belum turut serta dalam dunia politik.

Oleh sebab itu, benar jika arah masa depan demokrasi diramalkan akan bergeser menjadi netrokrasi. Konsep inilah yang saat ini sedang terjadi, seperti yang terjadi pada aktifitas partisipasi politik melalui akun Facebook Humor Politik.

Dapat dilihat bagaimana proses partisipasi terjalin, pesan apa yang muncul, dan bagaimana pesan itu kemudian dikemas sedemikian rupa untuk memperoleh perhatian dan akhirnya memperoleh kekuatan hegemonic (penguasaan informasi) atas lainnya. Peran pelaku partisipasi politik tidak bertumpu pada aktor politik di pemerintahan lagi melainkan dari tangan-tangan pelaku jaringan, apakah itu seorang individu ataupun komunitas tertentu yang tentunya membawa visi misi politik tersendiri. Walaupun juga perlu diingat bahwa pertemuan politik secara tatap muka juga sangat diperlukan, karena apa manfaat dan perannya jika aktifitas politik dilakukan seluruhnya dalam ruang maya. Sehingga, benar pemanfaatan *cyberspace* harus mengacu pada fungsinya sebagai pemerkuat demokrasi, bukan justru memperlemah demokrasi. Seperti yang diungkapkan oleh Saco dalam Andriadi (2016) mengenai demokrasi digital, bahwa demokrasi tanpa fisik tidak menguarangi kualitas demokrasi, karena dalam teknologi penerapan demokrasi partisipatoris mendekati idealnya. Walaupun, kehadiran ini secara maya, tetapi pengaruhnya terasa dan memberikan dampak, efek, dan implikasi. Melalui jaringan internet, seseorang warga Negara dapat menyalurkan uneg-uneg politiknya (Andriadi, 2016:13-15). Melalui akun media sosial Facebook Humor Politik, partisipan politik dapat menyalurkan apa yang menjadi pemikirannya dan dibuat dalam bentuk pesan sindirian, kritikan, atau dukungan pada konteks Pilkada DKI Jakarta.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada akun Facebook Humor Politik terkait kasus Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 dengan menggunakan analisis wacana kritis Norman Faircough, meme yang dibuat oleh akun Facebook Humor Politik (komunitas humor online yang memfokuskan pada konten politik) merupakan hasil produksi sendiri dan beberapa pesan politik dari *netizen* lain yang kemudian diunggah ulang. Teks pada meme bulan Januari, Februari, dan Maret 2017, meme mengandung pesan dalam bentuk sindiran, kritikan, tanggapan, dan dukungan. Bentuk konteks yang sering digunakan sebagai bahan meme antara lain, program

kerja dan karakter pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, serta konteks agama.

Bentuk sindirian dan kritikan menjadi pesan politik yang sering muncul. Objek sindiran dan kritikan ditujukan kepada pasangan calon nomer urut 1 (Agus Harimurti Yudhoyono – Sylviana Murni) dan pasangan calon nomer urut 3 (Anies Rasyid Baswedan – Sandiaga Salahudin Uno). Bentuk dukungan ditujukan kepada pasangan calon nomer urut 2 (Basuki Tjahaja Purnama – Djarot Saiful Hidayat) baik secara tersurat maupun tersirat.

Ekspresi yang muncul dari teks ujaran kebencian tergolong sedikit yaitu 23 (dua puluh tiga) meme dari total 218 (dua ratus delapan belas) meme. Pada bulan Januari ada 11 (sebelas) meme, bulan Februari ada 10 (sepuluh) meme, dan Maret ada 2 (dua) meme. Bentuk ujaran kebencian mengarah pada provokasi dan penghinaan. Konteks ujaran kebencian yang muncul terkait agama, suku dan atau ras, seksualitas, budaya dan personality.

Hasil analisis juga menemukan meme hasil reproduksi pesan yang mengandung unsur ujaran kebencian dan kemudian diproduksi lagi menjadi meme berbentuk sindiran dan kritikan. Terlepas dari sedikit banyaknya jumlah meme yang mengandung unsur ujaran kebencian, disimpulkan bahwa ujaran kebencian sebagai salah satu bentuk ekspresi partisipasi politik.

Media sosial Facebook Humor Politik memberikan fasilitas dan menjadi wadah diskusi politik di ruang publik maya dalam bertukar informasi terkait Pilkada DKI Jakarta 2017. Akun Facebook Humor Politik menjadi sarana baru partisipasi politik yang bebas dalam memproduksi pesan politik baik dalam berbentuk protes sosial, protes politik, kritik, dan atau dukungan politik. Hal ini menunjukkan bahwa produksi pesan politik di atas termasuk model partisipasi tidak konvensional (*unconvensional participation*).

Berdasarkan model partisipasi yang berlangsung, akun Humor Politik termasuk model partisipasi secara komunal. Sedangkan aktivitas politiknya berupa tindakan yang dapat dikategorikan sebagai kampanye yaitu model partisipasi politik berbentuk *electoral activity*. Hal ini didasarkan pada waktu teks dibuat dan

di*uplaod* antara bulan Januari hingga Maret dan juga dilihat dari bentuk konten yang dibuat.

Pemanfaatan ruang publik maya akun Humor Politik lebih mengarah pada pengemasan citra dan cenderung ke arah netrokrasi. Meme berupa pesan sindiran dan kritikan untuk paslon nomer 1 dan 3 dan dukungan untuk paslon nomer 2, menunjukkan pola partisipasi dengan mengekspresikan preferensi politiknya dan mengkampanyekan atau mempromosikan kandidat tertentu. Selain itu, menjadi wujud munculnya persaingan politik untuk memenangkan hati pemilih dan berpengaruh pada pembentukan image bagi aktor-aktor politik.

Pesan politik yang dikemas dengan humor (sindiran, kritikan, dukungan, ujaran kebencian) masa kini berdampak pada masa depan demokrasi di Indonesia dalam mendorong lebih banyak partisipasi. Hal ini tidak lepas dari pertumbuhan penggunaan internet yang semakin pesat. Di lain pihak, teknologi internet menjadi alat komunikasi dan informasi yang tengah digandrungi oleh generasi muda (*net generation*) yang rata-rata merupakan pemilih pemula. Oleh karena itu, sangat memungkinkan dengan menggunakan media social sebagai alat sosialisasi atau kampanye atau mencari dukungan dan lain sebagainya, dan menggunakan pesan politik yang bernuansa humor akan menarik perhatian kalangan muda yang sebelumnya belum turut serta dalam dunia politik.

Dari hasil penelitian ini, peneliti merekomendasikan beberapa saran antara lain; sebagai penanggulangan efek "Wajah Janus" dalam pesan politik, para partisipan politik seperti, (a) Komunikator Politik - keterlibatan diri dalam partisipasi politik pada media sosial penting dalam menunjukkan kreatifitas dan kepedulian tentang iklim politik, namun juga perlu disertai oleh pembelajaran politik semua pihak. Sehingga menjadi jelas, apakah unggahan bernuansa politik dalam jejaring sosial mengandung unsur ujaran kebencian, fitnah, kebohongan publik dan penghinaan atau tidak. (b) Komunikan Politik - keterlibatan secara pasif dalam menerima informasi politik juga harus diiringi sikap pro-aktif, yaitu sikap selektif dan kritis dalam menginterpretasikan pesan politik yang diterima. Sehingga tidak terjebak pada informasi yang belum benar atau *hoax.* Bagi penelitian selanjutnya, berkaitan dengan penelitian wacana ujaran kebencian dalam praktik

komunikasi politik, perlu dikembangkan juga analisis perbandingan dengan akun media sosial lain. Sehingga diharapkan penelitian perbandingan selanjutnya akan menghasilkan variasi jawaban dari sisi berbeda terkait pesan politik. Berkaitan dengan metode Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough, pada penelitian ini memiliki titik kelemahan, yaitu tidak dilakukan wawancara dengan akun terkait pada tahan analisis interpretasi. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya yang serupa dapat melengkapi tahapan analisis dengan melakukan wawancara. Sehingga, keabsahan data semakin kuat.

*****

DAFTAR PUSTAKA

Andriadi, Fayakhun. (2016). *Demokrasi di Tangan Netizen.* Jakarta: RMBOOKS.

----------, (2017). *Partisipasi Politik Virtual. Demokrasi Netizen di Indonesia.* Jakarta: RMBOOKS.

Ardial. (2010). *Komunikasi Politik.* Jakarta: PT Indeks.

Arifin, Anwar. (1992). *Komunikasi Politik dan Pers Pancasila.* Jakarta: Yayasan Media Sejahtera.

Badara, Aris. (2012). *Analisis Wacana: Teori, Metode, dan Penerapannya pada Wacana Media.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Budiardjo, Miriam, (2005). (ed.) *Dasar-dasar Ilmu Politik.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Cadtells, Manuel. (2008). *The New Public Sphere: Global Civil Society, Communication Networks, and Global Governance.* The Annals of the American Academy.

Creswell, John W. (2014). *Research Design. Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed.* Cet. 4. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Danim, Sudarwan. (2002). *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penulis Pemula Bidang Ilmu-ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora.* Bandung: CV Pustaka Setia.

Eriyanto. (2001). *Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKiS.

Firmanzah. (2008). *Mengelola Partai Politik. Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

----------, (2008). *Marketing Politik. Antara Pemahaman dan Realitas.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Gazali, Effendi. (2004). *Interaksi Politik dan Media: Dari Komunikasi Politik ke Politik Komunikasi.* Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 8, Nomor 1.

Heywood, Andrew. (2014). *Politik.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Lee, Monle dan Johnson, Carla. (2004) *Prinsip-prinsip Pokok Periklanan dalam perspektif Global.* Jakarta: Prenada Media.

Lim, Merlyna. (2013). *Many Clicks but Little Sticks: Social Media Activism in Indonesia.* Journal of Contemporary Asia.

----------, (2004). *The Internet, Sosial Networks, and Reform in Indonesia.* Jurnal Merlyna Lim Chapter 17.

----------, (2002). *Cyber-civic Space in Indonesia. From Panopticon to Pandemonium?* IDPR.

----------, (2003). *From War-net to Net-war: The Internet and Resistance Identities in Indonesia.* Elsevier Science Ltd.

Mansbach, Richard W. dan Kirsten L. Rafferty. (2012). *Pengantar Politik Globa*l. Bandung: Nusa Media.

Moleong, Lexy J. (1998). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

----------, (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mujani, Saiful. dkk. (2012). *Kuasa Rakyat: Analisis tentang Perilaku Memilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indeonesia Pasca-Orde Baru.* Ed.1. Jakarta: Mizan Publika.

Mulyana, Deddy. (2007). *"Hakekat, Definisi dan Konteks Komunikasi." Dalam Deddy Mulyana. Suatu Pengantar Ilmu Komunikasi.* Bandung: Rosda.

----------, (2007). *Komunikasi Politik Politik Komunikasi: Membedah Visi dan Gaya Komunikasi Praktisi Politik.* Bandung: Remaja Rosdakarya .

Nasrullah, Rulli. (2014). *Teori dan Riset Media Siber (Cybermedia).* Jakarta: Kencana.

Nimmo, Dan. (2011). (ed.) *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media.* Bandung: Remaja Rosdakarya.

Piliang, Yasraf Amir. (2010). (ed.) *Semiotika dan Hipersemiotika: Gaya, Mode, dan Matinya Makna.* Bandung: Matahari.

Putra, Dedi Kurnia Syah. (2015). *Komunikasi CSR Politik.* Ed. 1. Jakarta: Prenadamedia Group.

Samovar, et al., (2010). *Komunikasi Lintas Budaya. Communication Between Cultures.* Jakarta: Salemba Humanika.

Sayuti, Solatun Dulah. (2014). *Komunikasi Pemasaran Politik.* Bandung: Remaja Rosdakarya.

Scruton, Roger. (2013). *Kamus Politik.* Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR.

Setiyono, Budi. (2008). *Iklan dan Politik: Menjaring Suara dalam Pemilihan Umum.* Jakarta: AdGoal.Com.

Scruton, Roger. (2013). *Kamus Politik.* Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR.

Subiakto, Henry & Rachmah Ida. (2014). *Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi.* Ed. 2. Jakarta: Prenadamedia Group.

Tabroni, Roni. (2012). *Komunikasi Politik Pada Era Multimedia.* Bandung: Simbiosa Rekatama Media.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka.

Titscher, Stefan, dkk. (2009). *Metode Analisis Teks & Wacana.* Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wayansari, Agustina. (2011). *The Internet and the Public Sphere Indonesia's New Democracy a Study of Politikana.com.* Internetworking Indonesia Journal. Vol.3/No.2.

Sumber lain (Artikel di Internet, Handout, Surat Kabar dan lain-lain):

CR-01, Hasyim (editor). 2015. *Inilah Poin SE Kapolri tentang Ujaran Kebencian atau Hate Speech.* Diambil dari http://www.1kata.com/inilah-poin-se-kapolri-tentang-ujaran-kebencian-atau-hate-speech/. Diunduh pada 13 November 2015 pada 9.57 a.m.

Hamdani dan Sofyan Hadi. 2015. *Surat Edaran Kapolri yang Dicurigai.* Diambil dari Artikel Forum Keadilan: No. 26, 15 November 2015 hal 16-19: http://www.komnasham.go.id/sites/default/files/dokumen/Forum%20Keadilan%20Nomor%2026%20Tahun%20XXIV%209-15%20November%202015.pdf. Diunduh pada 13 November 2015 pada 9.58 a.m.

Kuwado, Fabian Januarius. 2015. *Pro Kontra Surat Edaran "Hate Speech" dan Jawaban Kapolri.* Diambil dari

http://nasional.kompas.com/read/2015/11/06/07423391/Pro.Kontra.Surat.Edaran.Hate.Speech.dan.Jawaban.Kapolri. Diunduh pada 13 November 2015 pukul 9.56 a.m.

Omah Kreatif. 2015 Trending Topik Worldwide #SaveHajiLulung, diunduh 17 April 2015: http://omahkreatif.co.id/fenomena-savehajilulung-viral-yang-mendunia/,

Purnama, Dara. 2015. *Dua Alasan Kapolri Terbitkan Surat Edaran Hate Speech.* Diambil dari

http://news.okezone.com/read/2015/11/02/337/1242188/dua-alasan-kapolri-terbitkan-surat-edaran-hate-speech. Diunduh pada 13 November 2015 pukul 9.56 a.m.

Tashandra, Nabila. 2015. *Edaran Kapolri soal "Hate Speech" Dinilai sebagai Blunder.* Diambil dari

http://nasional.kompas.com/read/2015/11/10/22400611/Edaran.Kapolri.soal.Hate.Speech.Dinilai.sebagai.Blunder. Diunduh pada 13 November 2015 pukul 9.49 a.m.

Suara Merdeka, edisi 19 April 2017

Jawa Pos, edisi 16 April 2017

Surat Edaran Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)